

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH
DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016-2018**

Egi Ahmad Fahrozy¹, Ana Sopanah², Indah Dewi Nurhayati³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: egifahrozy87@gmail.com

Abstract

Performance measurement in government agencies is a management tool to improve the quality of decision making and accountability. This aims to assess the success or failure of the implementation of activities in accordance with the previously set goals and objectives in order to realize the vision and mission of government agencies. This study aims to determine the performance using the principle of Value For Money in the local government of Malang City 2016-2018. This type of research is a quantitative description using secondary data obtained from BPKAD Malang City. The results showed that the performance of the city government of Malang from 2016-2018 as a whole was good. The economic ratio of the city government of Malang from 2016 to 2018 is less than 100%, which means it is economical. The efficiency ratio in 2016, 2017 and 2018 is less than 100% which means it is very efficient. The ratio of effectiveness in 2016, 2017 and 2018 is more than 100% which means it is effective.

Keywords: *Measurement of Local Government Performance, Value For Money, APBD*

A. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat seiring di berlakukannya otonomi daerah (Syawali, 2017 Dalam Mustofa, Hal 12). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan sesuai sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam anggaran.

Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk pelaksanaan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung melemah yang berakibat kepada wujud daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah serta perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan skala moneter. Efisiensi dari pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah dalam mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah di tetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Hak otonomi daerah yang diberikan di Kota Malang akan memberikan ruang untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya sendiri, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang di capai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan hasil yang telah di capai. Oleh sebab itu, Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi 5 program-program yang tidak layak secara ekonomi. (Kurniawati, 2016:735)

Kemampuan pemerintah daerah khususnya Pemerintah daerah Kota Malang dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Pendanaan yang dituangkan sebagai bentuk pendapatan, biaya dan pembiayaan daerah sangat diperlukan sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga, sangat perlu diolah dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban, penatausahaan, pengawasan, dan perencanaan keuangan. Dibutuhkannya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik sebagai rangka mengelola dana APBD secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam hal ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti ingin melakukan analisis pengukuran kinerja dan pada pemerintah daerah Kota Malang, dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018.

B. KAJIAN TEORI

1. Akuntansi Pemerintahan

Setiap Intansi Pemerintahan pada saat sekarang ini untuk senantiasa melakukan akuntansi agar pengelolaan keuangan yang di pertanggung jawabkan dapat terlihat transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi pemerintahan adalah proses pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, peringkasan, pengklasifikasi dan pelaporan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pemakai untuk pengambilan keputusan.

Pemerintahan sebagai organisasi yang memegang peranan sangat penting dan paling utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan, karena akuntansi pemerintah saat ini akan menuju pada akuntansi yang transparansi dan akuntabel.

2. Konsep Pengukuran Kinerja

Menurut Wibowo (2010:4) Kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja.

Permendagri No.38 Tahun 2018 (Bab I, Pasal 1:37) menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

3. Anggaran

Menurut Ramlah Basri (2013), “Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya.

Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Value For Money

Value for money menurut Mardiasmo (2009: 67) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah serta perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan skala moneter. Efisiensi dari pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah dalam mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (tangible output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (intangible output).

5. Pengertian Rasio

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering digunakan. Rasio keuangan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan sehingga kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan dapat diinterpretasikan. Rasio dapat dipahami sebagai perbandingan suatu angka tertentu pada suatu akun terhadap angka dari akun lainnya. Analisa rasio sering digunakan oleh manajer, analisis kredit, analisis saham. Analisis rasio bermanfaat karena membandingkan suatu angka secara relatif, sehingga bisa menghindari kesalahan penafsir pada angka mutlak yang ada di dalam laporan keuangan. Itulah dilihat perbandingan dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. (Murhadi, 2013; 56)

Kalau sekiranya hanya satu aspek saja yang ingin dinilai, maka satu atau dua rasio saja sudah cukup digunakan. – Perbandingan yang dilakukan haruslah dari perusahaan yang sejenis dan pada saat yang sama. Tidaklah tepat kita membandingkan rasio Universitas Sumatera Utara finansial perusahaan A pada tahun 1990 dengan rasio finansial perusahaan B pada tahun 1991. Sebaiknya perhitungan rasio finansial didasarkan pada data laporan keuangan yang telah diaudit (diperiksa).

1. Rasio Ekonomi

Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang di mungkinkan (spendingless). Pengertian ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Pengeluaran yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. Kinerja pemerintah daerah dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen.

Tabel 1
Kriteria Ekonomi

Rasio Ekonomi	Kriteria Ekonomi
Kurang dari 100%	Ekonomis
Sama dengan 100 %	Ekonomis Berimbang
Lebih dari 100%	Tidak Ekonomis

(Sumber: Khikmah, 2014)

2. Rasio Efisiensi

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatEfisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money*. Rasio efisiensi menggtakan (realisasi pengeluaran) dengan realisasi pendapatan yang diterima, formulasinya adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Realisasi belanja yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen.

Tabel 2
Kriteria Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
Sama dengan 100 %	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Sangat Efisien

(Sumber: Khikmah, 2014)

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggarani Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 3
Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Kurang dari 100%	Tidak Efektif
Sama dengan 100 %	Efektif Berimbang
Lebih dari 100%	Efektif

(Sumber: Khikmah, 2014)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2017) mengatakan metode penelitian kuantitatif metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-

ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Syamsudin & Damiyanti (2011) penelitian deskriptif Kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya.

Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder, data ini peneliti peroleh dari berbagai sumber yang telah ada, termasuk dokumen yang telah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur serta dari sumber lain yang berhubungan dan relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Ekonomi

Perhitungan Rasio ekonomis adalah perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Rasio ekonomis untuk tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Rasio Ekonomi
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Rasio Ekonomi
2016	43.150.000.000,00	77.750.000.000,00	55.50%
2017	62.400.000.000,00	120.044.926.560,00	51.98%
2018	26.198.996.407,00	26.198.996.407,00	100%

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa rasio ekonomi untuk tahun 2016 sebesar 55.50%, tahun 2017 sebesar 51.98%, tahun 2018 sebesar 100%. Rasio ekonomi tahun 2016-2017 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 cenderung mengalami peningkatan. Penurunan rasio ekonomi tahun 2017 sebesar 3,52% dikarenakan karena adanya kenaikan realisasi pengeluaran dari tahun 2016 sebesar Rp.43.150.000.000,00 tahun 2015 menjadi Rp. 62.400.000.000,00 diikuti oleh peningkatan anggaran pengeluaran dari tahun

2016 sebesar Rp.77.750.000.000,00 tahun 2017 menjadi Rp. 120.044.926.560,00.

Pada tahun 2018 rasio ekonomi mengalami peningkatan sebesar 48,02%, peningkatan ini disebabkan oleh penurunan realisasi pengeluaran tahun 2017 Rp. 62.400.000.000,00 tahun 2018 menjadi Rp. 26.198.996.407,00 diikuti oleh penurunan anggaran pengeluaran tahun 2017 sebesar Rp. 120.044.926.560,00 tahun 2018 menjadi Rp. 26.198.996.407,00.

2. Rasio Efisiensi

Perhitungan rasio efisiensi adalah perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. rasio efisiensi untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Rasio Efisiensi
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2016	1.709.998.678.059,97	1.974.387.562.026,98	86.61
2017	1.813.917.438.251,54	1.971.916.657.660,13	91.99
2018	1.925.070.651.868,55	2.040.194.240.906,67	94.36

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa rasio efisiensi untuk tahun 2016 sebesar 86.61%, tahun 2017 sebesar 91.99%, dan tahun 2018 sebesar 94.36%. Peningkatan rasio ekonomi tahun 2017 sebesar 7,75% dikarenakan karena adanya kenaikan realisasi Belanja dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.709.998.678.059,97 tahun 2018 menjadi Rp. 1.925.070.651.868,55 diikuti oleh peningkatan realisasi pendapatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.974.387.562.026,98 tahun 2018 menjadi Rp. 2.040.194.240.906,67.

Peningkatan rasio efisiensi tahun 2017 sebesar 5,38% dikarenakan adanya kenaikan realisasi belanja dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.709.998.678.059,97 tahun 2017 menjadi Rp. 1.813.917.438.251,54 diikuti oleh peningkatan realisasi pendapatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.974.387.562.026,98 tahun 2017 menjadi Rp. 1.971.916.657.660,13.

Pada tahun 2018 rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 2,37%, peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja tahun 2017 Rp.

1.813.917.438.251,54 tahun 2018 menjadi Rp.1.925.070.651.868,55 diikuti peningkatan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 1.971.916.657.660,13 tahun 2018 menjadi Rp. 2.040.194.240.906,67.

3. Rasio Efektivitas

Perhitungan Rasio efektivitas adalah perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Rasio efektivitas untuk tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Rasio Efektivitas
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas
2016	1.741.394.250.709,64	1.735.398.662.849,55	100.35%
2017	1.971.916.657.660,13	1.915.269.662.466,56	102.96%
2018	2.040.194.240.906,67	1.986.432.106.698,91	102.71%

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa rasio efektivitas untuk tahun 2016 sebesar 100,35%, tahun 2017 sebesar 102,96%, dan tahun 2018 sebesar 102.71%. Tahun 2016, 2017, dan 2018 rasio efektivitasnya adalah efektif karena rasionya lebih dari 100%.Peningkatan rasio efektivitas tahun 2017 sebesar 2,61% dikarenakan karena adanya peningkatan realisasi pendapatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.741.394.250.709,64 tahun 2017 menjadi Rp. 1.971.916.657.660,13, diikuti kenaikan anggaran pendapatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.735.398.662.849,55 tahun 2017 menjadi Rp. 1.915.269.662.466,56.Pada tahun 2018 rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 0,25%, penurunan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 1.971.916.657.660,13 tahun 2018 menjadi Rp. 2.040.194.240.906,67 diikuti kenaikan anggaran pendapatan dari tahun 2017 sebesar Rp. 1.915.269.662.466,56 tahun 2018 menjadi Rp. 1.986.432.106.698,91.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dengan metode value for money terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Rasio ekonomi untuk tahun 2016 sebesar 55.50%, tahun 2017 sebesar 51.98% dan tahun 2018 100%. Rasio ekonomi tahun 2015-2019 mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Rasio ekonomi pemerintah kota Malang tahun 2016 sampai dengan 2018 kurang dari 100%, maka artinya adalah ekonomis. Rasio efisiensi untuk tahun 2016 sebesar 86.61%, tahun 2017 sebesar 91.99% dan tahun 2018 sebesar 94.36%. Pada tahun 2016 rasio efisiensinya mengalami peningkatan menjadi 91.99%, sedangkan untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 cenderung mengalami peningkatan nilai rasio efisiensinya. Tahun 2016, 2017 dan 2018 kurang dari 100% artinya sangat efisien. Rasio Efektifitas untuk tahun 2016 sebesar 100.35%, tahun 2017 sebesar 102.96% dan tahun 2018 sebesar 102.71%. Tahun 2016, 2017, dan 2018 rasionya lebih dari 100% artinya adalah efektif. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 102.96%.

F. REFERENSI

Wibowo. (2010). Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Press.

Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Basri, Ramlah. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2651>, Vol.1 No.4, pp 202-212.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Murhadi, Werner R. 2013. Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

AR, Syamsudin dan Damaianti. (2011). Metode penelitian pendidikan bahasa. Bandung: remaja rosdakarya.

Muawanah, Shofi Nur dan Romandhon Kurniawati Mutmainah. 2016. Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Kepercayaan terhadap Sistem Informasi Akuntansi, kemampuan Teknis Pemakai Sistem Informasi Akuntansi dan Kenyamanan Fisik terhadap Kinerja Individu. Jurnal FakultasEkonomi.Universitas Sains Al-Qur'an. Volume 11, nomor 2, Juli 2016. ISSN (Online): 1907-426X.